TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN

SIARAN PERS

Realisasi Anggaran: Disiplin dan Kepemimpinan

Jakarta, 28 Januari 2013. Tata-kelola anggaran yang terukur dan tepat-waktu adalah kunci sukses utama memakmurkan rakyat. Namun sayang, menurut Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kuntoro Mangkusubroto, realisasinya kini masih kurang menggembirakan. Selain perencanaan yang kurang matang, lamanya waktu finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan adalah biangnya.

"Lain di pusat, lain pula di daerah," ujar ketua tim yang beranggotakan Wakil Menkeu Anny Ratnawati serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo itu. Di daerah, jelas Kuntoro, problemnya lebih banyak terletak pada lambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta belum andalnya sistem pengendalian dan sumberdaya manusia (SDM) di sana.

Untuk itu, pada Rabu, 23 Januari 2013, segenap pejabat yang berasal dari elemen pemerintah pusat—pimpinan Kementerian/Lembaga/Lembaga Negara (K/L/LN)—maupun pimpinan pemerintah provinsi (Pemprov), merapat di Jakarta. Perhelatan TEPPA itu dimaksudkan sebagai forum pembelajaran sekaligus langkah awal bagi penyamaan persepsi dan evaluasi atas realisasi anggaran.

Realisasi belanja K/L/LN per akhir 2012 masih menunjukkan tren penumpukan pada Desember. "Artinya, kita masih punya masalah pada perencanaan kegiatan beserta sistem pengendaliannya," terang Kuntoro. Kami dari TEPPA, imbuhnya, sudah barang tentu mengapresiasi K/L/LN berpenyerapan tinggi sekaligus memberikan perhatian terhadap yang serapannya rendah.

Anny Ratnawati pada rapat besar di Hotel Le Meridien Jakarta itu menyampaikan, "TEPPA sudah menyiapkan peranti pengendaliannya." Peranti itu, jelas Anny, antara lain berupa penetapan rencana penarikan dana (*disbursement plan*) dan pelaksanaan pengumuman lelang (limit: 11 Januari 2013) serta teken kontrak (limit: 15 Maret 2013). TEPPA juga mendorong K/L/LN untuk segera membangun sistem monitoring terpadu.

Pada sesi pertama, sesi pemerintah pusat, itu Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu yang diwakili oleh Plt. Direktur Sistem Perbendaharaan Sudarto mengatakan, "Kunci dari terjaminnya mutu belanja itu terletak pada tinjauan belanjanya." Tinjauan belanja (*spending review)* adalah bagian integral dari siklus anggaran.

Menginjak sesi Pemprov, TEPPA menekankan tentang betapa vitalnya peran gubernur. Bagi TEPPA, ini merupakan langkah awal untuk meluaskan jangkauan pengawasan TEPPA hingga ke kabupaten/kota pada 2013. "Untuk mengawasi realisasi anggaran di kabupaten/kota, gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat," papar Mardiasmo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengatakan "Gubernur mengemban lima tugas pokok." Kelimanya adalah: berkoordinasi dengan bupati/walikota, meminta laporan APBD Kabupaten/Kota, melaporkan hasil koordinasinya tersebut kepada Presiden melalui Mendagri, membangun laman khusus tentang informasi keuangan, serta mengevaluasi rancangan peraturan daerah (perda) dan pelaksanaan APBD. Pada sisi lain, agar keterlambatan penetapan tidak terulang, bersama Kemendagri, TEPPA akan terus mengawal penetapan perda APBD.

Penguatan peran pimpinan juga vital. Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan, tanpanya, semua perencanaan mustahil berjalan lancar. Ditambahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, "Sebagai gubernur, kita dituntut mampu melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan realisasi anggaran serta bertindak cepat manakala terjadi masalah di lapangan."

Sistem Monitoring dan Evaluasi TEPPA mencatat, pada akhir 2012, rerata realisasi anggaran provinsi mencapai 87,18%. Tiga teratasnya: Banten (99%), Sumatera Selatan (97%), dan Jawa Tengah (96%).